



BUPATI KONAWE

PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR : 06 TAHUN 2014

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa dan percepatan pembangunan di Desa serta peningkatan kualitas Sumber Daya Aparat Desa dan Masyarakat Desa dalam mendukung jalannya proses Pemerintahan di Desa. Pemerintah Kabupaten Konawe memberikan Program bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa kepada Desa Definitif Se-Kabupaten Konawe Tahun 2014;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas untuk mewujudkan tertib Administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang keuangan khususnya Alokasi Dana Desa, maka perlu adanya Petunjuk Teknis Operasional Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2014 sebagai aturan pelaksanaannya;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang tata cara dan Persyaratan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 72 Tahun 2009);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2014 Nomor 159);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2014.**

Bagian Kesatu Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 1

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan kepada Desa adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2014.
- (2) ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe dipergunakan untuk Belanja Desa yang meliputi Belanja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Daftar Desa penerima dan Rincian besaran ADD masing-masing serta Biaya Penunjang Kegiatan lainnya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh ADD direncanakan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai ketentuan pengelolaan anggaran yang dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Bagian Kedua Kelembagaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan Tim Pelaksana Desa terdiri atas :
 - Penanggung Jawab : Kepala Desa.
 - Ketua Tim Pelaksana : Sekretaris Desa.
 - Bendahara : Bendahara Desa.
 - Anggota : Unsur Masyarakat.
- (3) Tim Pelaksana Desa secara bersama-sama menatausahakan semua proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD.
- (4) Tim Pelaksana Desa mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana penggunaan ADD dengan mengacu pada RPJMDes tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

- b. Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
- c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD.
- d. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan fisik.
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara berkala dan berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan kabupaten.

Pasal 5

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten merupakan unsur Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggungjawab dalam pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Bupati Konawe sebagai Pembina.
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe sebagai Pengarah.
 - c. Kepala BPMPD Kabupaten Konawe sebagai Ketua Tim.
 - d. Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Kab. Konawe sebagai Sekretaris Tim.
 - e. Asisten I Bidang Tata Praja sebagai Anggota.
 - f. Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe sebagai Anggota.
 - g. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Anggota.
 - h. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Konawe sebagai Anggota.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya.
 - b. Melaksanakan desiminasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD.
 - c. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
 - d. Melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian monitoring dan evaluasi serta pengawasan bersama Tim Monitoring lainnya atas pelaksanaan ADD.
 - e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Daerah.
 - f. Menerbitkan rekomendasi pencairan dana ADD.
 - g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (3) Tim Kesekretariatan Kabupaten terdiri dari
 - 1. Kepala Sekretariat : Sekretaris BPMPD Kab. Konawe
 - 2. Sekretaris : Ka. Subid Keuangan dan Kebijakan Aset Desa
 - 3. Anggota :
 - 1. Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Kab. Konawe
 - 2. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masrakat BPMPD Kab. Konawe
 - 3. Bidang Pemberdayaan Adat, SosBud dan Usaha Ekonomi Rakyat BPMPD Kab. Konawe
 - 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan TTG BPMPD Kab. Konawe
- (4) Tim kesekretariatan Kabupaten mempunyai tugas
 - a. Melakukan fungsi administrasi umum tentang pelaksanaan ADD
 - b. Melakukan verifikasi proposal ADD
 - c. Memproses rekomendasi pencairan ADD
 - d. Monitoring, evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan ADD
 - e. Melaporkan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten melalui Inspektorat Kabupaten Konawe atas adanya indikasi penyalahgunaan dana ADD

- (5) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan atas Pelaksanaan ADD dilakukan oleh Tim Keskretariat Kabupaten yang disusun berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan ADD.

Pasal 6

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan merupakan unsur Perangkat Kecamatan yang memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :
- a. Camat sebagai Penanggung jawab.
 - b. Kasi Pemerintahan ketua tim.
 - c. Kasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa sebagai Anggota.
 - d. Kasi Kesra sebagai Anggota.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam wilayah kecamatan.
 - b. Membantu Tim Pelaksana Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya.
 - c. Merekomendasi usulan pencairan ADD dari desa yang telah memenuhi persyaratan.
 - d. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD.
 - e. Memfasilitasi Tim Pelaksana Desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD.
 - f. Melakukan pemantauan / pengendalian terhadap proses kegiatan di Desa yang pembiayaannya bersumber dari ADD.

Bagian Ketiga Belanja Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 7

Belanja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah untuk membiayai kegiatan yang Bersifat Pembangunan sarana dan prasarana (belanja barang dan belanja Modal) serta belanja Peningkatan Kinerja Aparatur di desa.

Pasal 8

- (1) Belanja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diprioritaskan untuk Belanja Aparatur dan Belanja Operasional Desa.
- (2) Belanja Aparatur Desa adalah Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) bagi Kepala Desa dan Perangkatnya yang ditetapkan masing-masing sebagaimana terlampir pada lampiran I Peraturan Bupati ini
- (3) Belanja Operasional Desa yaitu untuk membiayai kegiatan penunjang operasional Tim Pelaksana Desa Sebagaimana terlampir dalam lampiran I peraturan Bupati ini
- (4) Belanja Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana terlampir dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Mekanisme Penyaluran Dan Pencairan

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran Dana untuk ditransfer pada Rekening Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Konawe.
- (2) Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam dua tahapan sebagai berikut :
 - Tahap I disalurkan pada Triwulan pertama Tahun 2014
 - Tahap II disalurkan pada Triwulan ketiga Tahun 2014
- (3) Permintaan pencairan Alokasi Dana Desa diajukan kepada Bupati Konawe Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Konawe dengan melampirkan RPJM Desa, APB Desa dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) serta Rekomendasi dari Camat.
- (4) Kepala Desa dalam mengajukan Permohonan Pencairan ADD kepada Bupati Cq Kepala BPMPD Kabupaten Konawe untuk Tahap I melampirkan :
 - Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan ADD Tahap sebelumnya (LPJ Tahap II Tahun 2013).
 - Laporan Pendahuluan yang berisi Rencana Penggunaan Dana (RPD) 1 Tahun serta Foto kondisi Fisik 0%.
 - Laporan Desa tentang RPJMDesa
 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun sebelumnya.
 - Peraturan Desa tentang APBDesa untuk Tahun Anggaran 2014.
 - Foto Copy Rekening bendahara Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).
 - Foto Copy KTP Bendahara Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).
 - Foto Copy SK Kepala Desa yang diterbitkan oleh Bupati.
 - Foto Copy SK Perangkat Desa yang diterbitkan Kepala Desa.
 - Foto Copy SK Tim Penggerak PKK Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - Foto Copy SK BPD Desa yang diterbitkan oleh Bupati.
 - Foto Copy SK LPM Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
- (5) Selanjutnya Desa dalam mengajukan Permohonan Pencairan ADD Tahap ke II melampirkan :
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II.
 - Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan ADD Tahap I.
 - Peraturan Desa tentang RPJMDesa
 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun sebelumnya.
 - Peraturan Desa tentang APBDesa untuk Tahun Anggaran 2014.
 - Foto Copy Rekening bendahara Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).
 - Foto Copy KTP Bendahara Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).
 - Foto Copy SK Kepala Desa yang diterbitkan oleh Bupati.
 - Foto Copy SK Perangkat Desa yang diterbitkan Kepala Desa.
 - Foto Copy SK Tim Penggerak PKK Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - Foto Copy SK BPD Desa yang diterbitkan oleh Bupati.
 - Foto Copy SK LPM Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - Foto Kondisi Fisik Tahap I
- (6) Terhadap setiap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) Tim Kesekretariatan Tingkat Kabupaten melakukan Verifikasi sebagai dasar Penerbitan Usulan Rekomendasi Pencairan Dana.
- (7) Pencairan Dana untuk masing-masing Desa melalui Bendahara kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan setelah adanya Persetujuan Rekomendasi Tertulis Pencairan ADD dari Kepala BPMPD atas nama Bupati Konawe.
- (8) Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tidak diperbolehkan melakukan pemindahan dana ke rekening lain.

- (9) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) diselesaikan dan disampaikan paling lambat 14 hari setelah pencairan.
- (10) Alokasi Dana Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan diberikan setiap tahunnya kepada Desa yang selanjutnya dikelola dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Kegiatan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dilakukan menurut tahapan – tahapan sebagai berikut :

1. **Tahap Persiapan** meliputi proses pembentukan kelembagaan pengelolaan Alokasi Dana Desa serta kegiatan Sosialisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
2. **Tahap Perencanaan.**
 - a. Kepala Desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk Tim Pelaksana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - b. Tim Pelaksana Desa membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang meliputi Rencana Biaya, Kebutuhan Material serta Kelompok sasaran pada Masyarakat dan lain-lainnya sesuai kebutuhan yang berlaku.
 - c. Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
3. **Tahap Pelaksanaan.**
 - a. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada Masyarakat, Maka pada setiap pelaksanaan Kegiatan Fisik wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.
 - b. Papan Informasi kegiatan tersebut sekurang-kurangnya memuat : Nama Kegiatan, Volume Kegiatan, Besaran Anggaran dari ADD maupun Swadaya Masyarakat, dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan.
4. **Pertanggungjawaban.**

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Konawe melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Konawe.
5. **Pelaporan.**
 - a. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa kepada Tim Fasilitasi Kabupaten secara berjenjang.
 - b. Laporan Akhir merupakan laporan pelaksanaan secara keseluruhan dengan susunan sebagai berikut :
 - Pendahuluan.
 - Program dan Kegiatan ADD / Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD.
 - Pelaksanaan Penggunaan ADD.
 - Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah.
 - Perkembangan Fisik kegiatan yang dilengkapi dengan Foto kemajuan Fisik 0% s/d 100%.
 - Penutup. Laporan akhir disampaikan selambat-lambatnya pada minggu Pertama bulan Januari tahun 2015.

- Bagi kepala desa yang belum memasukan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan ADD 2013 tidak akan diproses pencairan dana ADD tahun anggaran 2014.

Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh aparat pengawasan Fungsional Pemerintah Kabupaten Konawe.

Bagian Keenam Sanksi Pasal 12

Kepala Desa yang tidak dapat memenuhi dan mematuhi peraturan bupati ini baik dari pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan ADD atau dengan sengaja menggunakan dana ADD dimaksud untuk kepentingan pribadi akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagian Ketujuh Penutup

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal : 14 - 02 - 2014

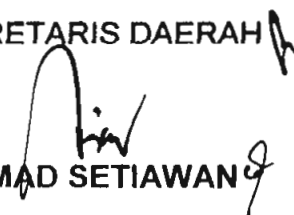
BUPATI KONAWE



KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal : 17 - 02 - 2014.

SEKRETARIS DAERAH



ACHMAD SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2014 NOMOR

**LAMPIRAN I : PETUNJUK PENGELOLAAN DAN ARAH PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN KONAWE
TAHUN ANGGARAN 2014.**

I. PENGELOLAAN DAN ARAH PENGGUNAAN ADD

A. UMUM

Secara umum agar pemanfaatan dana ADD dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka pengelolaan dana ADD harus berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDDesa.
2. Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD direncanakan secara terbuka melalui musyawarah desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
5. ADD tidak diperbolehkan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial ekonomi (seperti tugu batas desa, gapura, taman dll), serta pembangunan tempat ibadah baru. Khusus untuk tempat ibadah apabila sifatnya rehab atau pemeliharaan dapat menggunakan dana ADD dengan memperhatikan keanekaragaman pemeluk agama yang ada di desa.

B. ARAH PENGGUNAAN ADD

Arah penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat desa. Penggunaan ADD terbagi menjadi 2, yaitu ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan ADD untuk pemberdayaan masyarakat.

1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari:

a. Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD)

TPAPD diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa yang menduduki jabatannya berdasarkan surat keputusan yang berlaku.

Belanja Aparatur Desa adalah Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) bagi Kepala Desa dan Perangkatnya yang ditetapkan masing-masing :

1. Kepala Desa	sebesar Rp. 950.000,-	perbulan ;
2. Sekretaris Desa (Non PNS)	sebesar Rp. 350.000,-	perbulan ;
3. Kepala Urusan Pemerintahan	sebesar Rp. 250.000,-	perbulan ;
4. Kepala Urusan Ekbang	sebesar Rp. 250.000,-	perbulan ;
5. Kepala Urusan Umum	sebesar Rp. 250.000,-	perbulan ;
6. Trantib Desa	sebesar Rp. 250.000,-	perbulan ;
7. Pamong Tani Desa	sebesar Rp. 250.000,-	perbulan ;
8. Kepala Dusun I	sebesar Rp. 250.000,-	perbulan ;
9. Kepala Dusun II	sebesar Rp. 250.000,-	perbulan ;
10. Kepala Dusun III	sebesar Rp. 250.000,-	perbulan ;
11. RT 1 Dusun I	sebesar Rp. 200.000,-	perbulan ;
12. RT 2 Dusun I	sebesar Rp. 200.000,-	perbulan ;
13. RT 1 Dusun II	sebesar Rp. 200.000,-	perbulan ;
14. RT 2 Dusun II	sebesar Rp. 200.000,-	perbulan ;
15. RT 1 Dusun III	sebesar Rp. 200.000,-	perbulan ;
16. RT 2 Dusun III	sebesar Rp. 200.000,-	perbulan ;
17. Puutobu Desa	sebesar Rp. 200.000,-	perbulan ;
18. Imam Desa	sebesar Rp. 250.000,-	perbulan ;
19. Guru TPQ	sebesar Rp. 200.000,-	perbulan ;

b. Operasional pemerintah Desa.

Digunakan untuk operasional pemerintah desa dan operasional/honorarium Tim Pelaksana Desa, meliputi :

- Honorarium Tim Pelaksana Desa ditetapkan masing-masing :

1. Penanggung Jawab	sebesar Rp. 100.000,-	pertriwulan
2. Ketua Tim Pelaksana	sebesar Rp. 100.000,-	pertriwulan
3. Bendahara	sebesar Rp. 100.000,-	pertriwulan
4. Anggota	sebesar Rp. 100.000,-	pertriwulan

- ATK dan penunjang kegiatan lainnya sebesar Rp. 515.000,- pertahun

- d. Belanja Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa.
Digunakan untuk Operasional kelembagaan
BPD sebesar Rp. 1.500.000,- pertahun dan LPM sebesar Rp. 1.500.000,- pertahun.
- e. Belanja penguatan dan penunjang kegiatan Lembaga kemasyarakatan Desa
PKK sebesar Rp. 1.500.000,- pertahun

2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

ADD yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

- a. Belanja Modal, Barang/Jasa berupa Komputer (bukan Laptop), Meja Biro, Lemari Arsip, Kursi, penyambungan Listrik KWH dan sebagainya sebesar Rp. 4.024.000,- pertahun
- b. Belanja Bimbingan Teknis peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa, diikuti oleh para Kepala Desa atau salah satu Aparat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
 - Tempat pelaksanaan Bimbingan Teknis serta Lembaga Penyelenggara Bimbingan Teknis dimaksud ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Konawe.
 - penggunaan Biaya Kegiatan Bimbingan Teknis ditetapkan sebagai berikut:

Biaya Kontribusi Peserta	sebesar Rp. 4.000.000,-
Biaya Transportasi (Tiket Pesawat)	sebesar Rp. 3.000.000,-
Uang Saku Peserta Bimtek	sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Penggunaan Dana Bimbingan Teknis dimaksud dilaksanakan pada pencairan ADD Tahap I.

II. ORGANISASI PENGELOLAAN ADD

Guna menunjang efektifitas pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan tingkat Kabupaten (Pasal 5)

dan di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat. (Pasal 6)

Sebagai pelaksana ADD di tingkat desa dibentuk Tim Pelaksana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (Pasal 4)

III. PERENCANAAN ALOKASI DANA DESA

ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa dan penggunaan ADD terintegrasi dalam APB Desa. Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun dalam forum Musrenbangdes tahun sebelumnya yang merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa dengan berpedoman pada prinsip-prinsip P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa).

Program dan kegiatan hasil musrenbangdes yang akan dibiayai dengan ADD dituangkan dalam Rencana Penggunaan Desa yang disusun oleh Tim Pelaksana Desa didasarkan pada skala prioritas pembangunan tingkat desa.

IV. MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

A. Penyaluran dan Pencairan ADD

- a. Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran Dana untuk ditransfer pada Rekening Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Konawe.
- b. Penyaluran dana sebaaimana dimaksud pada point(a) dilaksanakan dalam dua tahapan sebagai berikut :
 - Tahap I disalurkan pada triwulan I tahun 2014
 - Tahap II disalurkan pada triwulan III tahun 2014
- c. Permintaan pencairan ADD diajukan kepada Bupati Konawe cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Konawe dengan melampirkan RPJM Desa, APB Desa dan Rencana Anggaran Belanja (RAB).
- d. Desa dalam mengajukan Permohonan Pencairan ADD kepada Bupati cq. Kepala BPMPD Kabupaten Konawe untuk Tahap I pada Triwulan I melampirkan :
 - Laporan Pendahuluan yang berisi Rencana Penggunaan Dana (RPD) 1 tahun serta foto kondisi Fisik 0%.
 - Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa (LPPD) tahun sebelumnya.

- Laporan Pendahuluan yang berisi Rencana Penggunaan Dana (RPD) 1 tahun serta foto kondisi Fisik 0%.
- Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa (LPPD) tahun sebelumnya.
- Peraturan Desa tentang APB Desa untuk Tahun Anggaran 2014.
- Fotocopy Rekening Bendahara Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).
- Fotocopy KTP Bendahara Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).
- Fotocopy SK Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Bupati.
- e. Selanjutnya Desa dalam mengajukan Permohonan Pencairan ADD Tahap II melampirkan :
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD).
 - Laporan Perkembangan Pelaksanaan ADD Tahap I.
 - Foto Kondisi Fisik Tahap I (50%).
- f. Terhadap setiap permohonan sebagaimana dimaksud pada point (d dan e) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten melakukan Verifikasi sebagai dasar Penerbitan Rekomendasi Pencairan Dana.
- g. Pencairan Dana untuk masing-masing Desa dilaksanakan setelah adanya Persetujuan Tertulis Pencairan ADD dari Kepala BPMPD atas nama Bupati Konawe.
- h. Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada pont (g) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tidak diperbolehkan melakukan pemindahan dana ke Rekening lain.
- i. Pencairan ADD dilakukan oleh Bendahara Tim Pelaksana Desa.
- j. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) diselesaikan dan disampaikan paling lambat 14 hari setelah pencairan.
- k. Alokasi Dana Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan diberikan setiap tahunnya kepada Desa yang selanjutnya dikelola dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dilakukan menurut tahapan – tahapan sebagai berikut :

1. **Tahap Persiapan** meliputi proses pembentukan kelembagaan pengelolaan Alokasi Dana Desa serta kegiatan Sosialisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
2. **Tahap Perencanaan.**
 - a. Kepala Desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk Tim Pelaksana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - b. Tim Pelaksana Desa membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk kegiatan Pembedayaan Masyarakat Desa dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang meliputi Rencana Biaya, kebutuhan material serta kelompok sasaran pada masyarakat dan lain-lainnya sesuai kebutuhan yang berlaku.
 - c. Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
3. **Tahap Pelaksanaan**
 - a. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan Kegiatan Fisik wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.
 - b. Papan Informasi Kegiatan tersebut sekurang-kurangnya memuat : Nama Kegiatan, Volume Kegiatan, Besaran Anggaran dari ADD maupun Swadaya Masyarakat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan.

V. PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

a. Pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Konawe melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Konawe.

b. Pelaporan.

- a. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa kepada Tim Fasilitasi Kabupaten secara berjenjang melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
- b. Laporan Akhir merupakan laporan pelaksanaan secara keseluruhan dengan susunan sebagai berikut :
 - Pendahuluan.
 - Program dan kegiatan ADD / Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD.

- Pelaksanaan penggunaan ADD.
- Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah.
- Perkembangan Fisik Kegiatan yang dilengkapi dengan Foto kemajuan fisik 0% s/d 100%.
- Penutup. Laporan akhir disampaikan selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan Januari Tahun 2015.
- Bagi kepala desa yang belum memasukan laporan pertanggungjawaban keuangan ADD 2013 tidak akan diproses pencairan dana ADD tahun anggaran 2014.

c. Pengawasan.

Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Kabupaten Konawe.

VI. SANKSI

Kepala Desa yang tidak dapat memenuhi dan mematuhi peraturan bupati ini baik dari pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan ADD atau dengan sengaja menggunakan dana ADD dimaksud untuk kepentingan pribadi akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

VII. PENUTUP

Demikian Teknis Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan yang didanai dengan ADD Tahun 2014.

Unaaha, 14... Februari 2014.

BUPATI KONAWE



KERY SAIFUL KONGGOASA

PARAF KOORDINASI		
	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN ADM. UMUM	
3	DINAS / BADAN / KANTOR	
4	BAGIAN <i>Hukum</i>	

LAMPIRAN II

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2014 Masing-masing Perdesa di Kabupaten Konawe

NO	KECAMATAN / DESA	BESARAN ADD PER DESA	RINCIAN PORSI ADD			OPS. TIM PELAKSANA DESA	KELEMBAGAAN, LEMBAGA KEMASYARAKATAN	A T K	RINCIAN PEMBAYARAN ADD			KETERANGAN
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		TAHAP II				TAHAP I	TAHAP II		
			TAHAP I	TAHAP II								
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	
KEC. ROUTA												
	1 DESA WALANDAWAWE	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,500,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS	
	2 DESA TIRAWONUA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,500,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS	
	3 DESA PARUDONGKA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,500,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS	
	4 DESA PUUWIWIRANO	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS	
	5 DESA TANGGOLA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS	
	6 DESA LALOMERUI	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS	
	7 DESA WIAU	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS	
KEC. LATOMA												
	1 DESA AMBEKAIRI UTAMA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS	
	2 DESA LATOMA JAYA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,500,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS	
	3 DESA LALOWATA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,500,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS	
	4 DESA ANDOLUTO	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,500,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS	
	5 DESA AMBONIKI	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,500,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS	
	6 DESA TITIOWA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS	
	7 DESA NESOWI	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS	
	8 DESA ANGONGA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS	
	9 DESA WOWALATOMA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS	
	10 DESA PINOLE	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS	
KEC. ASINUA												
	1 DESA LASADA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,500,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS	
	2 DESA NEKUDU	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,500,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS	
	3 DESA ASINUA JAYA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,500,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS	
	4 DESA ANGOHI	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,500,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS	
	5 DESA AWUA SARI	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS	
	6 DESA AWUA JAYA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS	
	7 DESA ASIPAKO	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS	

KEC. SOROPIA												
1	DESA	TAPULAGA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
2	DESA	BAJO INDAH	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
3	DESA	SORUE JAYA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
4	DESA	MEKAR	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
5	DESA	BOKORI	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
6	DESA	ATOWATU	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
7	DESA	SAWAPUDO	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
8	DESA	WAWORAH	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
9	DESA	SAPONDA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
10	DESA	SOROPTA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
11	DESA	SAPONDA LAUT	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
12	DESA	BAJOE	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
13	DESA	LEPPE	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
KEC. LALIMBUE												
1	DESA	LALIMBUE JAYA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
2	DESA	LALIMBUE	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
3	DESA	LABOTOY	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
4	DESA	MUARA SAMPARA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
5	DESA	SAMBARAASI	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
6	DESA	LAMENDORA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
7	DESA	ULU LALIMBUE	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
8	DESA	PEREO'A	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
9	DESA	TANI INDAH	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
10	DESA	LALONGGOMUNO	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
11	DESA	TOMBAWATU	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
12	DESA	KAPOJALA BARU	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
13	DESA	LABOTOY JAYA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
KEC. NII TANASA												
1	DESA	NII TANASA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
2	DESA	RAPAMBINOPAKA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
3	DESA	LALOMBONDA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	DESA	LALONGGASMEETO	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	5	DESA	PUUWONUA	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	6	DESA	BUMI INDAH	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	7	DESA	TOOLAWAWO	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	8	DESA	WATUNG GARANDU	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	9	DESA	TOLI - TOLI	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	10	DESA	WAWOBUNGI	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	KEC. BONTALA											
	1	DESA	PEBUNOOHA DALAM	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	2	DESA	BESU	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	3	DESA	PAKU JAYA	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	4	DESA	PAKU	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	5	DESA	PEBUNOOHA	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	6	DESA	LALONGGALUKU	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	7	DESA	MENDIKONU	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	8	DESA	RUMBIA	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	9	DESA	DIOLO	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	10	DESA	MOROSI	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	11	DESA	PUURUY	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	12	DESA	WONUA MORINI	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	13	DESA	TONDOWATU	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	14	DESA	TANGGOBU	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	15	DESA	RAMBU KONGGA	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	16	DESA	LAOSU JAYA	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	17	DESA	LALONGGALUKU TIMUR	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	18	DESA	PORABA	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	KEC. BONTALA											
	1	DESA	ANDEPALI	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	2	DESA	PUULORO	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	3	DESA	ANGGALOMOARE	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	4	DESA	ABELISAWAH	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	5	DESA	TOTOMBE JAYA	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DESA	LAKOMEA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	DESA	WAWOLIMBUE	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	DESA	POLUA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	DESA	GALLU	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	DESA	BAO - BAO	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	DESA	POHARA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	DESA	ANDAROA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	DESA	PIUSANGI	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	DESA	BONDOALA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	DESA	TABANGGELE	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	DESA	KONGGAMEA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	DESA	LASOSO	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	DESA	ANDADOWI	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	DESA	BAENI	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	DESA	ANGGALOMORE JAYA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	DESA	ANGGALOMORE JAYA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	DESA	ANGGALOMORE JAYA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	DESA	MATABURA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	DESA	DUNGGUA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	DESA	BENUA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	DESA	ANAHINUNU	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	DESA	ULU BENUA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	DESA	PUASANA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	DESA	LALONONA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	DESA	WAWOHINE	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	DESA	WATULAWU	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	DESA	MENDIKONU	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	DESA	AMANDETE	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	DESA	AMONGGEDO	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	DESA	MATAIWOI	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	DESA	LALOMBONDA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10	KEC. NERUHU										
	1	DESA	LAMELAY	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	2	DESA	AHUHU	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	3	DESA	WOERAHI	9,000,000	4,024,000	57,500,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	4	DESA	LAROWIU	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	5	DESA	TUDAMEASO	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	6	DESA	AHULOA	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	7	DESA	GAMPAGULE	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	11	KEC. ONEMBUTE										
	1	DESA	NAPOOSI	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	2	DESA	TRIMULYA	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	3	DESA	MATAIWOI	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	4	DESA	ULU MERAKA	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	5	DESA	SILEA	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	6	DESA	KUMAPO	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	7	DESA	KASUMEIA	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	8	DESA	ULU ONEMBUTE	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	9	DESA	TAIWAPEANDERE	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	12	KEC. PUNTA										
	1	DESA	LALONGGATU	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	2	DESA	PUUSANGI	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	3	DESA	WONUA MOROME	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	4	DESA	SONAI	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	5	DESA	POANAHA	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	6	DESA	PURIALA	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	7	DESA	WATUSA	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	8	DESA	AHUAWALI	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	9	DESA	UNGGULINO	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	10	DESA	MOKALELEO	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	11	DESA	TETEWATU	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	12	DESA	TETEHAKA	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	13	DESA	WAWOSANGGULA	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	14	DESA	PUUHOPA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	15	DESA	LALOONAH	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	1	DESA	LALOU MERA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	2	DESA	ULU POHARA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	3	DESA	LABELA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	4	DESA	ASUNDE	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	5	DESA	AMOSILU	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	6	DESA	LAWONUA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	7	DESA	SILEA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	8	DESA	RANOMOLUA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	9	DESA	ONEMBUTE	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	10	DESA	PUULOWARU	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	11	DESA	ANDOMESINGGO	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	12	DESA	PUNGGALUKU	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	13	DESA	PUNGGALUKU	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	14	DESA	ASOLU	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	15	DESA	SAMBEANI	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	1	DESA	PUNGGALUKU	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	2	DESA	WALAY	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	3	DESA	EPEEA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	4	DESA	PADANGGUNI	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	5	DESA	ALOSIKA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	6	DESA	LANGGEA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	7	DESA	SAMBAOSU	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	8	DESA	ALEUTI	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	9	DESA	ATODOPI	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	10	DESA	KUMAPO	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	11	DESA	PADANG MEKAR	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	12	DESA	MATANGGORAI	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	13	DESA	UNAASI JAYA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	DESA MATAHORI	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	17	DESA ARUBIA JAYA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	18	DESA KASUWARA INDAH	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	19	DESA PADANGGUNING UTAMA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	20	DESA MEKAR JAYA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
		KECAMATAN BAYU	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	1	DESA ASAKI	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,500,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	2	DESA WAWORAH	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,500,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	3	DESA AWULITI	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,500,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	4	DESA AMBERI	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,500,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	5	DESA MERAKA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,500,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	6	DESA TANGGOBU	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,500,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	7	DESA WATAREMA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	8	DESA WONUA HOA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	9	DESA TETEMBOHUA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
		KECAMATAN DIDAYA										
	1	DESA AHUAWATU	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,500,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	2	DESA WAWOLEMO	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,500,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	3	DESA AMESTU	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,500,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	4	DESA HONGOA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,500,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	5	DESA AMBUJULANU	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,500,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	6	DESA TIRAWUTTA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,500,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	7	DESA MUMUNDOWU	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,500,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	8	DESA BELATU	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,500,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	9	DESA PUJUMBINISI	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,500,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	10	DESA LALOIKA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	11	DESA LANGGOTOMI	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	12	DESA LALODANGGE	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	13	DESA WAWOLAHUM BUTI	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	14	DESA WONUA MANDARA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	15	DESA SULEMANDARA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	DESA	WONUA MONAPA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	17	DESA	LAHONGGUMBI	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	17 KEC. UPAI												
	1	DESA	AMAROA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	2	DESA	RAWUA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	3	DESA	AMERORO	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	4	DESA	ANGGOPIU	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	5	DESA	OLO – OLOHO	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	6	DESA	LANGGOMEA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	7	DESA	MATAHOALU	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	8	DESA	TAWAROTEBOTA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	9	DESA	TAWAMELEWE	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	10	DESA	BARUGA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	11	DESA	TAMESANDI	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	12	DESA	HUMBOTO	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	13	DESA	MOOREHE	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	14	DESA	ANGGAWO	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	15	DESA	KASAEDA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	16	DESA	TANGGONDIPO	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	17	DESA	PANGGULAWU	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	18	DESA	PUURODA JAYA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	18 KEC. TONGKURA												
	1	DESA	LALONGGOWUNA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	2	DESA	WAWORODA JAYA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	3	DESA	SANUANGGAMO	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	4	DESA	PUUNDOMBI	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	5	DESA	AMBOPI	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	6	DESA	ASAO	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	7	DESA	MOMEA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	8	DESA	ULUAO	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	9	DESA	ANDEPOSANDU	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	10	DESA	NAMBEABORU	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11	DESA OLO ONUA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	12	DESA AMBEPULU	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	13	DESA ANGOHU	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	14	DESA ANDALAMBE	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	15	DESA BAROWILA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	16 DESA WONGGEDUKU											
	1	DESA DURI AASI	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	2	DESA LALOUSU	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	3	DESA LAMOKUNI	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	4	DESA BENDEWUTA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	5	DESA BARUGA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	6	DESA LAHOTUTU	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	7	DESA WUKUSAO	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	8	DESA LAMBANGI	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	9	DESA LALOHAO	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	10	DESA WAWONGGOLE	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	11	DESA TETEMOTAHA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	12	DESA WATURAI	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	13	DESA WAWOONE	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	14	DESA KASUKIA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	15	DESA PUDAY	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	16	DESA TETEONA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	17	DESA WONGGEDUKU	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	18	DESA LINONGGASAI	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	19	DESA WAWOSOLO	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	20	DESA LANGGONAWAWE	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	21	DESA DAWI - DAWI	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
	22	DESA TOBIMEITA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	23	DESA AMBUWITU	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	24	DESA POLANDANGI	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	25	DESA TAWAROLONDO	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	26	DESA ANGGADOLA	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	DESA RANATUNDOBU	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
28	DESA ANGGORO	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
20	KEC WAIKOTOBI										
1	DESA NARIO INDAH	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
2	DESA KARANDU	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
3	DESA KORUMBA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
4	DESA ANGGOTOA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
5	DESA ANALAHUMBUTI	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
6	DESA KASUMEWUHO	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
7	DESA KUKULURI	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
21	KEC D. AWE										
1	DESA SANGGONA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
2	DESA HUDGA	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	35,131,500	Sekdes PNS
3	DESA UELAWU	77,239,000	9,000,000	4,024,000	57,600,000	1,600,000	4,500,000	515,000	41,107,500	36,131,500	Sekdes PNS
4	DESA UETE	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
5	DESA MOKOWU	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
6	DESA ASONIWOWO	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
7	DESA WONUA MBAE	81,439,000	9,000,000	4,024,000	61,800,000	1,600,000	4,500,000	515,000	43,207,500	38,231,500	Sekdes Non PNS
	Sub. Total	22,017,520,000	2,520,000,000	1,126,720,000	16,518,600,000	448,000,000	1,260,000,000	144,200,000	11,705,400,000	10,312,120,000	



PARAF KOORDINASI	
	PARAF
1	SEKDA
2	ASISTEN ADM. UMUM
3	DINAS / BADAN / KANTOR
4	BAGIAN